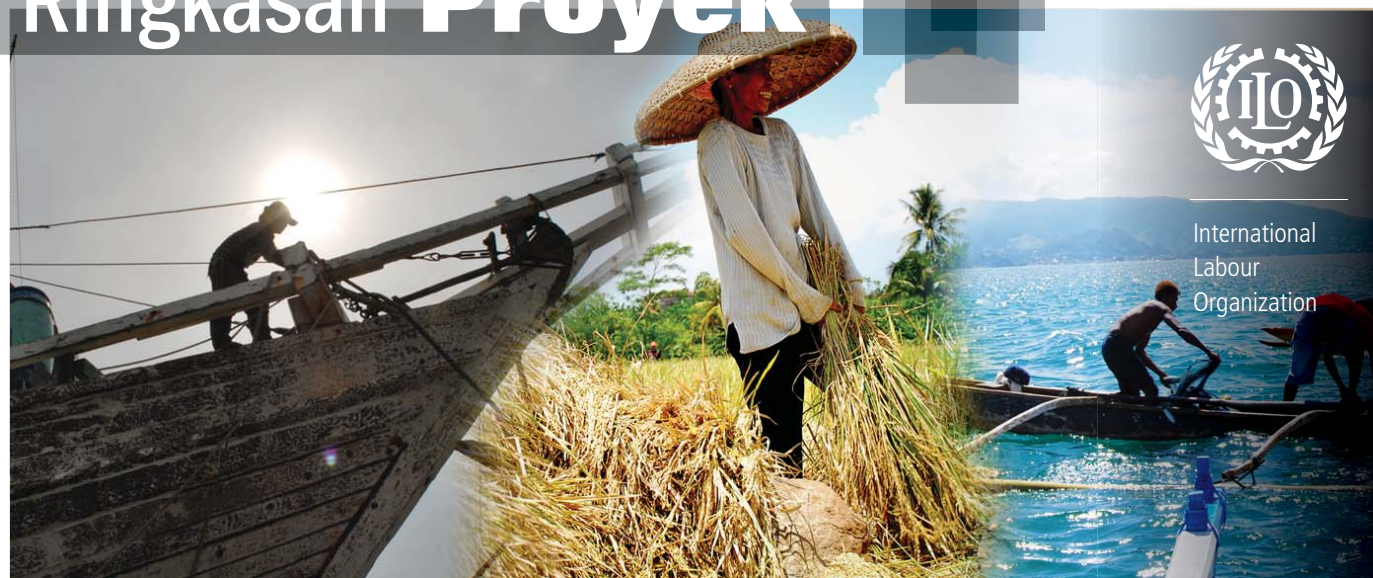


Ringkasan **Proyek**



Mendukung pelaksanaan “Layanan Satu Atap” dalam Strategi Perlindungan Sosial di Provinsi Jawa Timur dan Maluku

Tujuan Pembangunan	Proyek ini akan berkontribusi pada upaya nasional memperluas perlindungan sosial di tingkat lokal dalam menciptakan Layanan Satu Atap (LSA) untuk menyediakan layanan yang terkait dengan program perlindungan sosial dan bantuan ketenagakerjaan yang ada.
Tujuan Langsung	Di akhir tahun 2013, pelaksanaan LSA untuk menyediakan layanan sosial dan ketenagakerjaan akan mulai dilaksanakan di dua kabupaten di Provinsi Jawa Timur. LSA ini akan menghubungkan program perlindungan sosial dengan program penciptaan lapangan kerja dan khususnya disasarkan kepada kelompok rentan.
Mitra Utama	■ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ■ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ■ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi Jawa Timur dan Maluku ■ Dinas Tenaga Kerja Provinsi ■ Organisasi Pengusaha ■ Serikat Pekerja
Jangka Waktu	1 tahun (2013)
Cakupan Geografis	Provinsi Jawa Timur dan Maluku
Donor	 Pemerintah Jepang
Anggaran	USD 100,000
Kontak	Peter van Rooij Direktur vanrooij@ilo.org Tauvik Muhamad Staf tauvik@ilo.org Valerie Schmitt Spesialis Jaminan Sosial, Tim Pekerjaan Layak, Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik, Bangkok schmittv@ilo.org

Latar Belakang Proyek

Landasan Perlindungan Sosial (LPS) merupakan serangkaian jaminan sosial mendasar yang ditetapkan secara nasional yang perlu diperluas hingga mencakup seluruh penduduk. Pemerintah Indonesia berupaya memperluas cakupan jaminan sosial agar dapat menyediakan LPS bagi semua orang. Hak atas jaminan sosial universal tercermin dalam UUD 1945 Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Komitmen Indonesia terkait perlindungan sosial juga tercermin dalam Pakta Lapangan Kerja Indonesia tripartit 2011-2014 yang ditandatangani pada 13 April 2011.

Kendati sebagian perlindungan sosial dijamin di Indonesia melalui program bantuan sosial yang ada, yang memberikan akses kepada masyarakat miskin dan rentan untuk memperoleh kebutuhan akan barang dan jasa, namun pelaksanaan program-program ini masih belum dikelola secara efektif atau efisien hingga saat ini. Di bawah sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia, koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar dapat mengelola intervensi perlindungan sosial dengan baik. Penyediaan berbagai layanan jaminan sosial dan pelatihan/pekerjaan secara terpadu akan memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk tidak saja menerima layanan, tapi juga memperoleh pekerjaan layak, sehingga mereka dapat membantu penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat pada umumnya. LSA merupakan mekanisme yang dapat meningkatkan koordinasi, pemantauan dan pelaksanaan intervensi perlindungan sosial dan pasar tenaga kerja terpadu.

Proyek yang diusulkan ini akan membantu upaya menetapkan tingkat perlindungan sosial minimum di Provinsi Jawa Timur dan Maluku sesuai kewajiban pemerintah Indonesia berdasarkan Rekomendasi ILO No. 202 tentang Landasan Perlindungan Sosial Nasional, yang mewajibkan negara untuk membentuk dan mengelola skema LPS nasional.

Tujuan Proyek

1. Melaksanakan mekanisme “Layanan Satu Atap” (LSA) agar dapat menyediakan layanan sosial dan ketenagakerjaan, serta memfasilitasi peningkatan penyuluhan layanan yang ada;
2. Memfasilitasi koordinasi di kalangan pemangku kepentingan terkait di semua tingkatan (nasional, provinsi dan kabupaten); dan
3. Mengembangkan sistem pengelolaan informasi terpadu untuk mencatat pelaksanaan LSA di dua Kabupaten di Jawa Timur (data yang dikumpulkan memberikan informasi tentang pelaksanaan inisiatif serupa di Maluku); dan



4. Mendukung pemantauan dan evaluasi intervensi yang ada terkait program perlindungan sosial dan program penciptaan lapangan kerja.

Strategi Proyek

Proyek LSA akan dilaksanakan di tingkat lokal oleh para manajer yang ditunjuk. Para manajer ini akan mendaftarkan para penerima manfaat, menilai kebutuhan mereka serta mengembangkan rencana yang sesuai terkait akses mereka terhadap pengembangan keterampilan, penempatan kerja dan layanan pembentukan usaha. Di samping itu, para manajer ini pun akan menyediakan informasi tentang layanan dan tunjangan sosial yang ada. Mekanisme penyampaian keluhan akan dibuat agar dapat meningkatkan mutu layanan sosial.

Proyek ini akan menggunakan pendekatan partisipatif agar dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki dan menjamin kelangsungan proyek ini. Serangkaian lokakarya dan pertemuan konsultasi akan diadakan dengan para pemangku kepentingan tripartit terkait, LSM dan organisasi berbasis masyarakat untuk mengembangkan rencana kerja LSA dan menyelesaikan rancangan layanan, kegiatan yang diusulkan dan evaluasi proyek.

Proyek ini akan bekerja sama secara erat dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan Maluku, terutama badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dan kantor pemerintahan setempat.

Praktik terbaik dan pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan LSA ini akan didokumentasikan agar dapat membantu prakarsa di masa mendatang guna memperluas jaminan sosial sejalan dengan cakupan universal dan LPS. Berdasarkan hasil yang dicapai proyek ini, layanan LSA dapat dilaksanakan di provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Keluaran Proyek yang Dirumuskan

Untuk mencapai indikator keluaran yang telah ditetapkan terkait peningkatan akses masyarakat setempat terhadap perlindungan sosial dan layanan ketenagakerjaan, kegiatan-kegiatan berikut ini diharapkan dapat dilaksanakan:

- Mendukung pembentukan LSA di Provinsi Jawa Timur dan Maluku;
- Mendukung pengembangan Sistem Manajemen Informasi;
- Mendukung pengembangan sarana metodologi dan penelitian untuk melaksanakan LSA;
- Mendukung peningkatan kapasitas dan infrastruktur LSA; dan
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi.